



Yogyakarta Arus

Utamakan Komitmen Layak Anak

● WAHU SURYANA

YOGYAKARTA — Kota Yogyakarta terus tingkatkan kuantitas dan kualitas layanan yang layak. Tidak cuma mengejar predikat, menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak Kota Yogyakarta menjadi tujuan utama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad mengatakan, penguatan turut menasar keluarga. Sebab, keluarga jadi penopang perlindungan anak.

Hari ini, jumlah anak-anak (-18 tahun) mencapai 102 ribu orang atau 26 persen dari total 413 ribu penduduk Kota Yogyakarta. Karenanya, pengarusutamaan hak-hak dan perlindungan anak jadi titik strategis.

Ada empat hak anak mulai hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan hak berpartisipasi. Edy menciónkan, mewujudkan daerah-daerah yang layak anak merupakan suatu kewajiban pemangku kebijakan. "Kalau di Indonesia targetnya memang 2030, tapi kalau kami berusaha mencapai Kota Layak Anak (KLA) menjadi target yang sesegera mungkin bisa dicapai," kata Edy, kepada *Republika*, Senin (22/7).

Ia menerangkan, ada 24 indikator mencapai KLA yang dikelompokkan ke dalam lima kluster ditambah satu kelembagaan. Kluster pertama untuk hak sipil dan kebebasan yang memiliki tiga indikator.

Mulai dari akta kelahiran, informasi yang layak dan partisipasi. Kluster kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang salah satu indikatornya pekawinan anak.

Kota Yogyakarta sudah memiliki Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Pernikahan Dini bagi Anak. Selain itu, psikolog-psikolog tidak cuma dihadirkan di tiap-tiap puskesmas tapi di UPT P2TP2A.

Kemudian, kluster tiga mencakup kesehatan dasar dan kesejahteraan. Indikatornya, terkait persalinan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah diberikan intervensi baik untuk APBD maupun sampai BPJS. "Prevalensi gizi memang masih menjadi pekerjaan rumah karena masih ada beberapa anak yang gizinya kurang baik, penganannya integrasi baik lewat keluarga, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan," ujar Edy.

Fasilitas kesehatan dengan pelayanan yang ramah anak memang menjadi salah satu yang membanggakan. Hingga kini, dari target 16 sudah ada 18 puskesmas yang menaungkan diri menjadi Puskesmas Ramah Anak.

Bahkan, salah satunya, Puskesmas Mergangsari, mendapatkan apresiasi

dikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Penyuluh Pengarusutamaan Hak Anak, Yuli Ahmad Sartari menuturkan, indikatornya mulai wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak dan sembilan Pusat Kreativitas Anak (PKA).

Untuk Sekolah Ramah Anak (SRA) masing-masing sekolah sudah dibekali pengetahuan terkait Konvensi Hak Anak. Walau dari Perwali mencakup semua sekolah, DPMPPA tetap mendampingi sekitar 110 sekolah TK-SMP. "Kluster lima mencakup perlindungan khusus terkait korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas dan anak berhadapan hukum, terorisme, atau stigma," ujar Yuli.

DPMPPA kerap pula menghadirkan Gender Corner di tiap-tiap kegiatan. Bahkan, sudah ada *hotline* terkait hukum, kesehatan dan masalah-masalah anak yang bisa dihubungi melalui WhatsApp di 081-285-7799.

■ edi fernan rahadi

nasional pada Selasa (23/7) malam. Puskesmas itu jadi satu dari 21 puskesmas dari seluruh Indonesia yang menerima penghargaan.

Air minum dan sanitasi masuk kluster lima. Khusus untuk ini karena sudah menjadi bagian 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen layanan sanitasi, angka buang air besar sembarangan (BABS) sudah 0 persen. "Terkait sanitasi layak hanya punya pekerjaan rumah sekitar satu persen untuk Kota Yogyakarta, sedangkan air minum untuk yang layak cuma ada pekerjaan rumah sekitar sekitar dua persen," kata Edy.

Edy menuturkan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Iklan Promosi dan Sponsor (IPS) sudah cukup maksimal pembatasannya. Untuk KTR sudah dihadirkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pembatasannya.

Kluster keempat mencakup pendi-

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005